Analisis Penerapan Pengendalian Internal Dalam Rekonsiliasi Kas Kecil (*Petty Cash*) Untuk Meningkatkan Akurasi Laporan Keuangan Di PT Socfindo

Alfian Basyir Lubis[1], **Wahyu Syarvina**[2], **Nursantri Yanti**[3)]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

email: azynca11@gmail.com

Abstract

This study examines the implementation of internal control in the petty cash reconciliation process at PT Socfindo, identifies problems affecting financial statement accuracy, and formulates improvement strategies. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, direct observations, and documentation involving finance staff, petty cash custodians, and document verification personnel. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing, supported by source and technique triangulation. The findings indicate that petty cash management using the Advance Payment Request (PUM) system has not been supported by written standard operating procedures, clear segregation of duties, standardized transaction documentation, digital recording, or regular monitoring. Furthermore, reconciliation is primarily conducted before monthly financial reporting, resulting in delayed accountability, document accumulation, and discrepancies between physical cash balances and recorded amounts. These weaknesses potentially reduce the reliability and accuracy of financial statements. This study is limited to a single company, which may restrict the generalizability of the findings. Therefore, the company needs to strengthen internal control through the development of written standard operating procedures, digitalization of petty cash records, clear segregation of duties, staff training, and regular monitoring. This study contributes to the understanding of internal control in PUM-based petty cash reconciliation within a large-scale plantation company through the COSO framework.

Keywords: *Financial Statement Accuracy, Internal Control, Petty Cash, Reconciliation, PUM System.*

1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan yang akurat merupakan fondasi utama dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh manajemen serta menjadi alat penting bagi pemangku kepentingan dalam menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan (Nurlaila, Nurbaiti, & Nasution, 2022). Salah satu komponen penting dalam sistem pelaporan keuangan adalah kas kecil (petty cash), yaitu dana tunai yang disediakan untuk pengeluaran rutin perusahaan dengan jumlah relatif kecil, seperti pembelian alat tulis kantor, biaya transportasi lokal, atau konsumsi rapat (Nur'aidah, Puspita, Sari, & Santoso, 2024). Meskipun nominalnya tidak besar, namun tanpa pengelolaan dan pengendalian yang tepat, kas kecil berpotensi menjadi sumber ketidaktepatan pencatatan, penyalahgunaan dana, bahkan kecurangan (fraud).

Dalam konteks manajemen keuangan perusahaan, keterkaitan

antara pengendalian internal, pengelolaan kas kecil, dan akurasi laporan keuangan merupakan hubungan yang tidak terpisahkan (Nabila & Syarvina, 2022). Pengendalian internal adalah proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan seluruh personel perusahaan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam hal efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sari, Hasyim, & Idris, 2024). Pengendalian internal yang efektif bertujuan untuk menjaga integritas transaksi keuangan, mencegah penyimpangan, dan memastikan bahwa seluruh pengeluaran termasuk yang berasal dari dana kas kecil tercatat secara akurat dan transparan.

Kas kecil adalah dana tunai yang disediakan untuk membiayai pengeluaran rutin perusahaan yang bersifat kecil, mendesak, dan tidak efisien jika dilakukan melalui proses pembayaran formal atau non-tunai (Sofiah & Syarvina, 2022). Kas kecil yang tidak dikelola dengan sistematis berpotensi menjadi titik lemah dalam rantai pengendalian keuangan, terutama jika tidak didukung dengan dokumentasi pendukung dan prosedur rekonsiliasi yang standar (Irayana & Vonna, 2024). Oleh karena itu, penerapan pengendalian internal yang memadai dalam pengelolaan kas kecil akan berdampak langsung terhadap keandalan laporan keuangan perusahaan.

Akurasi laporan keuangan merujuk pada sejauh mana laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan aktual perusahaan tanpa manipulasi, kesalahan pencatatan, atau kelalaian informasi. Laporan keuangan yang akurat sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen maupun eksternal seperti investor, auditor, dan pemangku kepentingan lainnya (Awalia, Siregar, & Syarvina, 2023). Laporan keuangan yang akurat tidak hanya mencerminkan kinerja finansial yang sesungguhnya, tetapi juga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan strategis.Fenomena saat ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan, termasuk perusahaan besar sekalipun, menghadapi permasalahan serius dalam proses rekonsiliasi kas kecil, terutama ketika sistem pengendalian internal tidak berjalan optimal. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perbedaan antara saldo kas aktual dan yang tercatat di pembukuan, serta menurunkan akurasi laporan keuangan. PT Socfindo, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet dengan aktivitas operasional tinggi, tidak lepas dari persoalan ini.

Berdasarkan hasil observasi awal melalui wawancara dengan bapak Syahrizal bagian perbelanjaan PT Socfindo, informan menyatakan bahwa perusahaan menggunakan sistem Permintaan Uang Muka (PUM) dalam pengelolaan kas kecil. Secara konseptual, PUM berbeda secara fundamental dari metode imprest maupun metode fluktuasi yang lazim digunakan dalam pengelolaan kas kecil. Pada metode imprest, dana kas kecil ditetapkan dalam jumlah tetap dan pengisian kembali hanya dilakukan sebesar nilai yang telah dibelanjakan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah (Ningsih, Nurlaili, & Zuliansyah, 2022). Pada metode fluktuasi, saldo kas kecil dapat berubah sesuai kebutuhan, namun tetap dicatat secara langsung setiap kali terjadi pengeluaran. Sementara itu, PUM merupakan mekanisme advance payment di mana

pegawai menerima dana terlebih dahulu sebelum kegiatan dilaksanakan, sehingga pertanggungjawaban bersifat ex-post (setelah penggunaan dana). Pola ini menciptakan jeda waktu antara pencairan dan pelaporan yang lebih panjang dibandingkan metode konvensional, sehingga risiko keterlambatan rekonsiliasi, kehilangan dokumen, dan kesenjangan saldo menjadi lebih tinggi (Munawwaroh, 2017). Dengan demikian, sistem PUM di PT Socfindo menghadirkan tantangan pengendalian internal yang secara struktural berbeda dari kas kecil berbasis imprest atau fluktuasi. Sistem ini belum didukung dengan pencatatan yang konsisten serta dokumentasi yang terstandarisasi. Proses pencatatan dilakukan secara manual dan berulang kali terjadi keterlambatan akibat akumulasi dokumen yang belum diproses.

Namun demikian, terdapat pandangan teoretis yang berlawanan terhadap pendekatan pengendalian internal yang ketat. Menurut (Rahayu, Ekonomi, & Bisnis, 2024), fleksibilitas dalam pengeluaran operasional adalah aspek penting bagi efisiensi. Jika kontrol terlalu birokratis, justru akan menghambat kelancaran aktivitas rutin dan menciptakan beban administratif berlebih yang menimbulkan tekanan psikologis yang berlebihan terhadap pegawai pelaksana, yang pada akhirnya justru dapat menurunkan kepatuhan prosedural. Dalam konteks kas kecil, perusahaan mungkin lebih memilih pendekatan yang longgar dan cepat, meskipun harus mengorbankan akurasi dalam jangka pendek. Pandangan ini menimbulkan dilema manajerial tentang bagaimana menyeimbangkan antara efisiensi operasional dan akurasi laporan keuangan.

Fenomena ini sejalan dengan temuan (Rosianie, Asmarini, & Amalia, 2024) dan (Sari et al., 2024)yang mengungkap bahwa walaupun sebagian perusahaan telah menerapkan sistem pemisahan tugas dan rekonsiliasi berkala, namun masih terdapat kelemahan seperti kurangnya pelatihan petugas kas kecil dan minimnya penghitungan fisik yang berdampak pada kesalahan pencatatan. Demikian pula, (Firdiana, Marina, & Sa'diyah, 2023) dan (Irayana & Vonna, 2024) dalam studi menunjukkan bahwa rekonsiliasi berkala dapat meningkatkan efektivitas pengendalian kas, namun implementasinya kerap menghadapi kendala administratif dan teknis.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan novelty dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini secara khusus menganalisis rekonsiliasi kas kecil berbasis sistem PUM, yang berbeda dari metode konvensional. Sistem PUM mengandung karakteristik unik berupa mekanisme advance payment yang tidak ditemukan dalam metode imprest maupun fluktuasi, sehingga memberikan kontribusi pemikiran baru dalam kajian pengendalian internal kas kecil. Kedua, studi dilakukan pada perusahaan perkebunan besar yang memiliki kompleksitas operasional dan geografis tinggi, yang belum banyak diteliti. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan teoritis (COSO dan agency theory) dengan temuan lapangan, untuk menyusun rekomendasi perbaikan pengendalian internal yang kontekstual dan aplikatif. Keempat, pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap praktik-praktik aktual di lapangan, termasuk kendala dan dinamika pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pengendalian internal, permasalahan pada proses rekonsiliasi kas kecil di PT Socfindo,

dampak terhadap akurasi laporan keuangan, serta menyusun strategi perbaikan dan rekomendasi internal. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur pengendalian internal serta memberikan implikasi praktis bagi manajemen perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas keuangan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Hardani, 2020). Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan pengendalian internal dalam proses rekonsiliasi kas kecil di PT Socfindo. Metode ini sesuai untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara sistematis dan faktual.

Lokasi penelitian dilakukan di PT Socfindo, perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan. Objek dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal dan proses rekonsiliasi kas kecil (petty cash), khususnya yang menggunakan sistem Permintaan Uang Muka (PUM). Subjek penelitian meliputi staf keuangan, pemegang kas kecil, serta pihak yang terlibat dalam proses verifikasi dan pencatatan transaksi kas kecil.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi (Aksara, Akademia, & Akademia, 2023). Wawancara dilakukan dengan bapak Syahrizal dan Ibu Yanti bagian Keuangan PT Socfindo, dan Bapak Rizal bagian Verifikasi Dokumen Tagihan PT Socfindo untuk memperoleh informasi mengenai prosedur, kendala, dan implementasi pengendalian internal. Observasi dilakukan terhadap proses pencatatan dan pelaporan kas kecil. Sementara dokumentasi diperoleh dari bukti transaksi, formulir PUM, dan laporan keuangan internal perusahaan.

Data dianalisis menggunakan model (Huberman, 1992), melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk memilah informasi penting, penyajian data dilakukan dalam bentuk deskriptif, dan kesimpulan diperoleh berdasarkan pola-pola yang muncul dari data lapangan.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik, serta melakukan member check kepada informan. Etika penelitian dijaga dengan menyampaikan maksud penelitian kepada pihak perusahaan, menjaga kerahasiaan data, serta tidak menyebarluaskan informasi yang bersifat internal di luar kepentingan akademik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Umum Prosedur Kas Kecil di PT Socfindo

Pengelolaan kas kecil merupakan aspek fundamental dalam siklus akuntansi perusahaan yang sering kali dipandang remeh karena jumlah nominalnya yang relatif kecil. Namun, jika tidak dikelola secara sistematis, kas kecil justru dapat menjadi titik rawan dalam rantai akuntabilitas keuangan. Di PT Socfindo, salah satu perusahaan perkebunan swasta besar di Indonesia, kas kecil digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan operasional harian, terutama pengeluaran yang bersifat rutin dan mendesak.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan Bapak Syahrizal, selaku staf bagian Keuangan, terungkap bahwa sistem pengelolaan

kas kecil yang digunakan di perusahaan ini adalah metode Permintaan Uang Muka (PUM). PUM merupakan sistem di mana pegawai terlebih dahulu mengajukan permintaan dana tunai untuk keperluan tertentu, kemudian mempertanggungjawabkannya setelah dana digunakan. Prosedur ini secara struktural berbeda dari metode imprest, yang menetapkan jumlah kas kecil secara tetap dan hanya melakukan pengisian kembali sebesar nilai yang telah dibelanjakan. Perbedaan mendasar terletak pada urutan proses: dalam imprest, pengeluaran terjadi lebih dahulu baru kemudian dana diganti; sedangkan dalam PUM, dana dicairkan terlebih dahulu sebelum kegiatan dilaksanakan. Karakteristik advance payment ini menciptakan periode pertanggungjawaban yang lebih panjang dan rentan terhadap ketidaktepatan pencatatan apabila tidak didukung mekanisme pengawasan yang ketat. Dalam implementasinya, banyak kendala teknis dan administratif yang menyebabkan terjadinya inefisiensi dan menurunnya efektivitas sistem pengendalian internal.

Dalam penjelasannya, Bapak Syahrizal menyatakan:

"Biasanya kalau ada dinas keluar daerah para karyawan, biasanya mereka buat dulu formulir PUM. Nah jadi para karyawan bisa buat dokumen ijo, kayak dokumen pembayaran gitu, lalu di cetak dokumen ijonya bersama domumen pendukung seperti kwintansi pembayaran, struk spbu, dan nanti di tanda tangan kepala bagian gitu terus di kasih ke kasir, abis itu kasir membawa ke direksi untuk mengecek dan mensahkan dokumen ijo tadi, barula uang kas tadi cair." (wawancara 17 Juli 2025)

Secara normatif, prosedur ini terlihat sederhana dan cukup memadai untuk menjawab kebutuhan operasional yang cepat. Namun, dalam implementasinya, banyak kendala teknis dan administratif yang menyebabkan terjadinya inefisiensi dan menurunnya efektivitas sistem pengendalian internal. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Rizal, yang bertugas pada bagian verifikasi dokumen PUM.

Informan menuturkan bahwa: *"Kami sering menumpuk dulu beberapa nota sebelum dibuat laporan pertanggungjawabannya. Kadang ada nota hilang atau tidak lengkap, jadi harus bolak-balik konfirmasi. Kadang juga kita lupa notanya dipakai yang mana, jadi harus ingat-ingat lagi."* (wawancara 18 Juli 2025)

Pernyataan ini mengindikasikan beberapa permasalahan mendasar dalam praktik pengelolaan kas kecil di PT Socfindo:

1. Ketiadaan Sistem Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dokumen SOP tertulis tidak tersedia untuk memandu setiap tahapan dalam proses PUM, mulai dari permintaan dana, pencairan, penggunaan, hingga pelaporan. Akibatnya, pegawai cenderung bekerja berdasarkan kebiasaan atau praktik informal yang diwariskan dari staf sebelumnya. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya ketidakkonsistenan dalam pelaporan.

2. Prosedur Pertanggungjawaban yang Tidak Tepat Waktu

Kebiasaan menunda penyusunan laporan pertanggungjawaban, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yanti, menyebabkan proses rekonsiliasi tidak dapat dilakukan secara tepat waktu. Keterlambatan ini menghambat kelancaran siklus

akuntansi dan memperbesar kemungkinan terjadinya misstatement dalam laporan keuangan.

3. Dokumentasi Bukti Transaksi yang Lemah

Beberapa nota pembelian bersifat informal, tidak mencantumkan informasi penting seperti tanggal transaksi, rincian barang, atau nama toko. Bahkan ada yang hanya berupa catatan tangan tanpa stempel toko. Minimnya bukti pendukung yang sah memperlemah akuntabilitas dan membuka peluang bagi potensi manipulasi data atau fraud kecil-kecilan yang sulit dideteksi.

4. Ketergantungan pada Sistem Manual

Seluruh proses pengajuan, pencairan, dan pelaporan masih dilakukan secara manual dengan menggunakan kertas. Tidak adanya sistem informasi akuntansi berbasis digital menyebabkan duplikasi data, kesalahan pencatatan, serta kesulitan dalam pelacakan historis transaksi.

5. Ketidakseimbangan antara Kecepatan Operasional dan Kepatuhan Administratif

Dari sisi operasional, metode PUM memberikan fleksibilitas dan kecepatan dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak. Namun dari sisi akuntabilitas, sistem ini menciptakan trade-off antara efisiensi dan pengendalian. Tanpa pemantauan dan verifikasi berkala, prosedur PUM menjadi celah dalam sistem pengendalian internal.

6. Ketidakterpaduan Antardepartemen

Komunikasi antara bagian pengadaan, keuangan, dan audit internal masih bersifat informal dan tidak terdokumentasi. Hal ini menyebabkan tidak adanya pelacakan tanggung jawab yang jelas jika terjadi selisih antara pencairan dan realisasi pengeluaran.

Evaluasi Komponen Pengendalian Internal (Berdasarkan COSO Framework)

Penelitian ini menggunakan kerangka COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal pada proses rekonsiliasi kas kecil di PT Socfindo. COSO menyusun lima komponen utama yang saling terkait, yakni: Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, serta Monitoring. Berikut adalah analisis mendalam untuk masing-masing komponen berdasarkan data lapangan:

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Lingkungan pengendalian merupakan pondasi awal dalam sistem pengendalian internal yang mencerminkan integritas, nilai etika, dan kompetensi personel. Namun dalam kasus PT Socfindo, hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan formal atau SOP tertulis yang secara spesifik mengatur tentang kas kecil. Menurut Ibu Yanti dari bagian keuangan:

"Kami memang belum punya manual prosedur atau SOP resmi khusus kas kecil. Biasanya hanya berdasarkan kebiasaan dari senior." (wawancara 17 Juli 2025)

Pernyataan ini menegaskan bahwa praktik yang berjalan hanya didasarkan pada kebiasaan turun-temurun, bukan sistem formal yang terdokumentasi. Kondisi ini berisiko menimbulkan inkonsistensi antar unit kerja, karena interpretasi kebijakan

menjadi subjektif. Selain itu, tanpa panduan tertulis, sulit untuk menegakkan akuntabilitas jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan kas kecil.

2. Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Penilaian risiko dalam kerangka COSO berfungsi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, termasuk dalam hal pengelolaan kas kecil. Namun, dalam praktik di PT Socfindo, tidak ditemukan adanya mekanisme formal untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait.

Risiko seperti pengeluaran fiktif, duplikasi nota, pengumpulan bukti tidak sah, atau penggunaan dana pribadi tanpa ganti rugi, tidak dikelola secara preventif. Wawancara dengan Bapak Rizal, yang menangani laporan pertanggungjawaban kas kecil, mengungkapkan bahwa:

"Kalau ada nota hilang atau kelebihan uang, biasanya kami lapor saja dan tunggu konfirmasi dari atasan. Tapi tidak ada sistem khusus untuk menilai itu sebagai risiko." (wawancara 18 Juli 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa penilaian risiko hanya dilakukan secara reaktif, yakni setelah terjadi selisih atau ketidaksesuaian saldo. Tidak adanya pendekatan proaktif dalam memetakan dan memitigasi risiko dapat menimbulkan kecurangan sistemik (fraud risk) dan memperbesar peluang terjadinya material misstatement dalam laporan keuangan.

Menurut teori keagenan, ketidakseimbangan informasi antara manajer dan pemilik (principal-agent problem) dapat menciptakan moral hazard. Tanpa penilaian risiko yang jelas, tindakan pengawasan menjadi lemah, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan meningkat.

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)

Aktivitas pengendalian merupakan prosedur dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan manajemen dilaksanakan secara efektif. Namun, dari hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa fungsi pemisahan tugas (segregation of duties) tidak berjalan secara optimal. Ibu Yanti menyatakan:

"Kadang saya sendiri yang minta uang, belanja, sampai buat laporannya. Karena memang timnya sedikit dan supaya lebih cepat" (wawancara 18 Juli 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu rangkaian transaksi, satu orang bisa berperan sebagai pemohon, pelaksana, dan pelapor. Kondisi ini sangat bertentangan dengan prinsip dasar pengendalian internal, yang menganjurkan pemisahan tugas antara pelaku transaksi dan pemeriksa.

Implikasinya adalah tingginya risiko fraud, karena tidak ada verifikasi independen terhadap keabsahan transaksi. Selain itu, tidak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan atau kehilangan dana.

Analisis terhadap situasi ini memperlihatkan bahwa perusahaan lebih mengutamakan efisiensi jangka pendek daripada akuntabilitas jangka panjang, yang dapat merusak integritas sistem keuangan secara keseluruhan. Dari perspektif COSO, lemahnya aktivitas pengendalian ini mencerminkan kegagalan dalam membangun struktur organisasi yang mendukung kontrol efektif.

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)

Komponen informasi dan komunikasi dalam COSO menekankan pentingnya penyampaian informasi yang relevan dan tepat waktu ke seluruh level organisasi. Namun, praktik di lapangan menunjukkan lemahnya dokumentasi dan aliran informasi yang terstandarisasi.

Menurut observasi, komunikasi antara pengguna kas kecil dan bagian keuangan dilakukan secara informal melalui obrolan lisan atau pesan singkat. Tidak ada sistem dokumentasi elektronik atau arsip formal yang dapat ditelusuri. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Rizal:

"Kalau laporan belum lengkap, biasanya kami tanya via WhatsApp. Kadang bon-nya baru dikumpul dua minggu kemudian." (wawancara 18 Juli 2025)

Minimnya sistem komunikasi formal menyebabkan hilangnya jejak audit (audit trail) dan menyulitkan proses akuntabilitas. Selain itu, ketiadaan dokumentasi yang memadai membuat informasi keuangan menjadi tidak dapat diandalkan saat dibutuhkan untuk proses audit atau penilaian kinerja.

Dari perspektif COSO, kelemahan ini mengindikasikan bahwa organisasi tidak menyediakan sarana komunikasi yang mendukung pengendalian internal yang kuat dan transparan.

5. Pemantauan (Monitoring)

Pemantauan adalah komponen penting dalam menilai efektivitas sistem pengendalian internal secara berkelanjutan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa PT Socfindo belum memiliki mekanisme monitoring yang reguler dan sistematis terhadap aktivitas kas kecil. Ibu Yanti menjelaskan bahwa:

"Rekonsiliasi kas kecil biasanya dilakukan akhir bulan saja, itu pun kalau semua nota sudah masuk. Kadang masih ada nota yang tertinggal bulan sebelumnya." (wawancara 17 Juli 2025)

Hal ini mengindikasikan bahwa proses monitoring bersifat insidental, tidak terjadwal secara rutin, dan tidak menggunakan indikator evaluasi tertentu. Ketiadaan monitoring berkala memungkinkan terjadinya penumpukan kesalahan pencatatan, kesenjangan saldo kas, serta manipulasi data yang tidak segera terdeteksi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merusak kredibilitas laporan keuangan dan menurunkan kepercayaan stakeholder terhadap akuntabilitas perusahaan.

COSO menekankan pentingnya evaluasi internal yang berkelanjutan dan audit independen sebagai bagian dari sistem pengawasan. PT Socfindo belum secara maksimal menjalankan prinsip ini, sehingga menciptakan blind spot dalam rantai kontrol keuangan internal.

Dampak terhadap Akurasi Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakteraturan dalam pengelolaan kas kecil di PT Socfindo berdampak langsung dan signifikan terhadap akurasi laporan keuangan internal perusahaan. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, ditemukan adanya perbedaan yang cukup konsisten antara jumlah kas kecil berdasarkan catatan manual dengan jumlah kas yang secara fisik dipegang oleh petugas kas kecil. Menurut keterangan dari Bapak Rizal, bagian verifikasi dokumen tagihan,

keterlambatan ini merupakan hal yang umum terjadi dalam praktik sehari-hari. Informan menyatakan:

"Sering kali data PUM bulan lalu baru masuk bulan ini. Jadi kadang waktu mau tutup buku, kas kecil belum semua terlapor. Apalagi kalau ada nota yang hilang atau belum dikembalikan, ya harus ditunda dulu sampai semua dokumennya lengkap." (wawancara 18 Juli 2025)

Pernyataan tersebut mencerminkan tidak hanya keterlambatan administratif, tetapi juga ketergantungan yang tinggi terhadap kelengkapan dokumentasi fisik sebagai satu-satunya basis pelaporan. Ketiadaan sistem digital atau pencatatan berbasis waktu nyata (*real-time*) memperparah kesenjangan antara transaksi yang terjadi dan waktu pencatatannya dalam sistem laporan keuangan.

Selain itu, Ibu Yanti, staf bagian keuangan yang bertugas mengompilasi laporan bulanan, mengonfirmasi bahwa:

"Ada kasus di mana saldo kas kecil tercatat Rp 2.000.000, tapi setelah dicek fisik, hanya Rp 1.500.000. Sisanya belum dilaporkan karena katanya notanya belum selesai dikumpulkan." (wawancara 17 Juli 2025)

Fenomena ini menunjukkan adanya risiko material misstatement pada laporan keuangan, terutama pada akun pengeluaran operasional harian. Misstatement semacam ini, apabila terjadi secara berulang dan tidak segera diperbaiki, dapat mengaburkan posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, kondisi ini berpotensi menciptakan asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk auditor internal dan pihak eksternal seperti investor atau regulator.

Dari perspektif teori keagenan (*agency theory*), kegagalan dalam menyajikan data kas kecil secara akurat memperkuat potensi konflik kepentingan antara pihak manajemen (agent) dan pemilik modal (principal). Manajer yang memiliki informasi lebih banyak, namun tidak mengungkapkan data secara akurat, dapat merugikan pemilik yang mengandalkan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan strategis.

Secara akuntansi, akurasi informasi dalam akun kas dan pengeluaran rutin sangat penting karena mempengaruhi laporan arus kas, laporan laba rugi, dan posisi neraca jangka pendek. Ketika pengeluaran kas kecil dilaporkan terlambat, hal ini menciptakan distorsi dalam pembukuan bulan berjalan, dan berakibat pada ketidaksesuaian antara realisasi kas dengan estimasi anggaran.

Faktor penyebab utama dari ketidaksesuaian ini, menurut hasil wawancara dan observasi lapangan, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Ketiadaan sistem informasi keuangan yang terintegrasi antara bagian operasional (pengguna dana) dan bagian keuangan (pencatat dan pelapor).
2. Bergantungnya pencatatan pada bukti fisik (nota, faktur) tanpa adanya sistem pelaporan digital atau backup.
3. Kurangnya pemantauan berkala dan tidak adanya sistem audit mendadak terhadap kas kecil.
4. Pemahaman staf yang belum memadai terkait urgensi pencatatan tepat waktu dan dampaknya terhadap keandalan

laporan keuangan.

Analisis ini menunjukkan bahwa kendala teknis seperti kehilangan dokumen, keterlambatan pengumpulan nota, atau kurangnya pemisahan fungsi kerja bukan hanya masalah administratif semata, melainkan berimplikasi serius terhadap integritas sistem pelaporan keuangan perusahaan.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistemik dalam pengelolaan kas kecil, termasuk implementasi digitalisasi PUM, pelatihan staf, serta integrasi sistem pengendalian internal berbasis prinsip COSO untuk meminimalkan celah yang dapat memengaruhi validitas laporan keuangan. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan memperbaiki proses teknis, tetapi juga untuk membangun akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana operasional perusahaan.

Strategi Perbaikan dan Rekomendasi Internal

Berdasarkan temuan empiris di lapangan serta wawancara dengan informan dari PT Socfindo, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kelemahan struktural dan operasional dalam pengelolaan kas kecil. Kelemahan tersebut berkisar pada kurangnya prosedur baku, sistem manual yang tidak efisien, tumpang tindih tugas, serta minimnya pengawasan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi perbaikan disusun secara kontekstual dan aplikatif, mengacu pada kerangka teori COSO serta hasil observasi aktual di perusahaan.

1. Penyusunan SOP Pengelolaan Kas Kecil Berbasis Sistem Imprest

Hingga saat ini, PT Socfindo belum memiliki dokumen resmi berupa Standard Operating Procedure (SOP) khusus yang mengatur alur pengelolaan kas kecil. Proses masih berjalan berdasarkan kebiasaan dan inisiatif individu, yang menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan. Bapak Syahrizal, selaku bagian keuangan, menyatakan:

"Kami belum punya SOP resmi, jadi biasanya hanya berdasarkan pengalaman atau arahan lisan dari atasan. Kadang cara pelaporan saya berbeda dengan rekan lain di unit berbeda." (wawancara 17 Juli 2025)

Oleh karena itu, penyusunan SOP berbasis sistem imprest menjadi rekomendasi utama. Sistem imprest menetapkan saldo tetap yang akan diisi kembali sesuai jumlah yang telah dibelanjakan dengan bukti pengeluaran sah. Penerapan SOP ini penting untuk menciptakan standarisasi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap tahapan proses mulai dari permintaan hingga pertanggungjawaban dana.

2. Implementasi Digitalisasi Kas Kecil

Salah satu permasalahan utama yang ditemukan di lapangan adalah sistem pencatatan manual yang rawan tertunda, tidak sinkron, dan tidak terdokumentasi dengan baik. Menurut Bapak Rizal dari bagian pembelanjaan:

"Sering kami kumpulkan dulu nota-nota, baru nanti dibuat laporan. Kalau lupa atau notanya hilang, ya harus minta lagi ke toko. Kadang udah lama." (wawancara 17 Juli 2025)

Digitalisasi proses kas kecil menjadi solusi strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Penggunaan aplikasi internal atau sistem keuangan sederhana berbasis cloud memungkinkan pegawai menginput data transaksi secara real-

time dan mendokumentasikan bukti elektronik (foto nota, tanda tangan digital). Selain mengurangi risiko kehilangan dokumen, sistem ini juga memungkinkan rekonsiliasi otomatis, pengawasan lebih cepat, dan integrasi langsung dengan laporan keuangan.

3. Pemisahan Tugas secara Tegas dan Terstruktur

Penelitian menemukan bahwa satu individu sering kali menangani seluruh proses, mulai dari pengajuan dana, penggunaan, hingga pelaporan. Hal ini melanggar prinsip dasar aktivitas pengendalian (*control activities*) dalam model COSO, yang menekankan pentingnya segregasi tugas sebagai bentuk pengawasan internal. Ibu Yanti menyebutkan:

"Kadang karena unit kami kecil, saya sendiri yang ajukan uang, belanja, bahkan bikin laporan. Praktis sih, tapi kadang jadi capek dan rawan lupa." (wawancara 18 Juli 2025)

Oleh karena itu, diperlukan sistem pembagian tugas yang jelas antara pemohon (requester), pengguna (spender), dan pemeriksa/penyetuju (verifier). Langkah ini tidak hanya menurunkan risiko manipulasi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas individu dalam setiap proses.

4. Pelatihan Rutin tentang Pengendalian Internal dan Manajemen Dokumen

Kurangnya pemahaman staf terhadap fungsi pengendalian internal menjadi hambatan tersendiri. Tidak semua pegawai memahami pentingnya pencatatan yang disiplin, bukti transaksi sah, dan prosedur rekonsiliasi. Bapak Syahrizal menegaskan:

"*Sebagian staf baru belum ngerti kenapa nota itu harus asli atau kenapa harus ada cap toko. Mereka pikir yang penting dilaporin aja."* (wawancara 17 Juli 2025)

Untuk mengatasi hal ini, perusahaan disarankan mengadakan pelatihan rutin bagi seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelolaan kas kecil. Materi pelatihan dapat meliputi:

a. Prinsip-prinsip pengendalian internal
b. Pengisian dan pelaporan formulir PUM
c. Kriteria validitas bukti transaksi
d. Teknik rekonsiliasi dan audit sederhana

Pelatihan ini akan membentuk budaya kerja yang lebih transparan, disiplin, dan bertanggung jawab, serta mengurangi kesalahan administratif yang kerap terjadi.

Pengawasan Berkala oleh Auditor Internal

Minimnya pengawasan merupakan faktor krusial yang menyebabkan akumulasi kesalahan dan kelalaian dalam pengelolaan kas kecil. Proses verifikasi dan pencocokan data sering kali hanya dilakukan menjelang tutup buku atau saat audit eksternal. Hal ini menciptakan ruang yang lebar untuk kesalahan, bahkan fraud yang tidak terdeteksi. Untuk itu, disarankan agar dilakukan audit internal berkala dengan pendekatan:

a. Sampling audit atas dokumen kas kecil setiap dua minggu/bulan
b. Surprise audit tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk meningkatkan kepatuhan dan ketelitian staf
c. Pencatatan hasil audit secara sistematis dan ditindaklanjuti secara administratif

Langkah ini akan memperkuat fungsi pemantauan (monitoring)

dalam pengendalian internal dan menumbuhkan budaya kerja yang taat prosedur dan waspada terhadap kesalahan.

Pembahasan Penelitian

Deskripsi Umum Prosedur Kas Kecil di PT Socfindo

Temuan dari PT Socfindo menunjukkan bahwa pengelolaan kas kecil masih bersifat konvensional dan belum didukung oleh sistem pengendalian internal yang kuat. Sistem Permintaan Uang Muka (PUM) yang digunakan memang fleksibel, tetapi membuka potensi risiko akuntabilitas karena tidak ada alur prosedural yang baku. Tidak adanya SOP tertulis, seperti yang dikonfirmasi oleh Bapak Syahrizal dan Ibu Yanti, membuat praktik kerja lebih banyak bergantung pada kebiasaan lama daripada prinsip formal akuntansi.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Firdiana et al. (2023) yang menyebutkan bahwa ketiadaan SOP dalam manajemen kas kecil dapat mengakibatkan inkonsistensi pencatatan dan lemahnya kontrol terhadap pengeluaran rutin. Begitu pula Rosianie et al. (2024) menemukan bahwa sistem manual yang tidak terdokumentasi menyebabkan tingginya ketergantungan pada memori personal dan menyulitkan audit internal.

Selain itu, proses pencatatan yang bersifat manual dan kurang terintegrasi antar departemen menunjukkan belum diterapkannya prinsip Enterprise Resource Planning (ERP) sebagaimana disarankan dalam literatur manajemen modern (Munawwaroh, 2017). Tanpa sistem digital, proses pelaporan cenderung tertunda dan rentan terhadap kehilangan data, yang berdampak langsung pada keandalan laporan keuangan.

Evaluasi Komponen Pengendalian Internal (Berdasarkan COSO Framework)

Evaluasi terhadap sistem pengendalian internal PT Socfindo dengan pendekatan COSO menemukan sejumlah kelemahan di setiap komponen utamanya:

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment): Ketidakhadiran SOP dan lemahnya komitmen manajerial terhadap kontrol kas kecil mencerminkan lemahnya nilai integritas sistem. Hal ini bertentangan dengan teori COSO yang menekankan bahwa struktur formal adalah fondasi awal dari kontrol yang efektif (Iswahyudi, 2022).
2. Penilaian Risiko (Risk Assessment): Penilaian risiko dilakukan secara reaktif dan belum dibentuk dalam sistem terstruktur. Ini menguatkan argumen dalam agency theory (Yazdipour & Song, 1986), bahwa ketidakjelasan dalam mitigasi risiko memungkinkan moral hazard oleh agen (manajer) yang memiliki informasi lebih banyak daripada principal (pemilik modal).
3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities): Lemahnya pemisahan tugas sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Yanti, menunjukkan lemahnya segregation of duties, yang merupakan prinsip utama dalam COSO. Penelitian oleh Irayana & Vonna (2024) juga menyimpulkan bahwa satu orang yang menjalankan lebih dari satu

fungsi dalam transaksi kas kecil adalah penyebab utama inefisiensi dan meningkatnya risiko fraud.

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication): Minimnya dokumentasi formal serta ketergantungan pada komunikasi informal (WhatsApp) bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ini sesuai dengan temuan Pasaribu et al. (2023) yang menyatakan bahwa sistem komunikasi yang tidak terdokumentasi menyebabkan lemahnya audit trail dan potensi disinformasi.
5. Pemantauan (Monitoring): Monitoring hanya dilakukan pada akhir bulan atau menjelang audit, bukan secara berkelanjutan. Hal ini tidak sejalan dengan praktik terbaik dalam COSO yang menekankan perlunya pemantauan rutin dan evaluasi terhadap efektivitas control (Qudah et al., 2023).

Permasalahan dalam Proses Rekonsiliasi Kas Kecil

Rekonsiliasi merupakan titik sentral dalam pengendalian kas kecil, tetapi dalam praktik PT Socfindo, proses ini justru paling lemah. Berdasarkan temuan lapangan, rekonsiliasi hanya dilakukan menjelang penyusunan laporan bulanan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip audit internal yang menyarankan rekonsiliasi kas kecil dilakukan secara harian atau mingguan (Irayana & Vonna, 2024).

Ketidakberesan lainnya adalah bukti transaksi yang tidak sah, seperti nota tulis tangan tanpa tanggal atau stempel, sebagaimana diakui oleh Bapak Syahrizal. Ini mendukung kesimpulan dalam (Lubis, Nurbaiti, & Aisyah, 2023) bahwa kualitas dokumentasi yang buruk adalah penghambat utama dalam rekonsiliasi kas dan pengawasan keuangan.

Secara teoretis, lemahnya rekonsiliasi ini melanggar prinsip dasar dalam agency theory, yang menyebut bahwa proses pengawasan (seperti rekonsiliasi) adalah alat untuk meminimalisasi asimetri informasi antara agent dan principal. Jika rekonsiliasi tidak dilakukan dengan disiplin, maka peluang penyalahgunaan dana oleh pihak internal menjadi sangat tinggi (Laylan Syafina, Ulfatul Makwa, 2022).

Dampak terhadap Akurasi Laporan Keuangan

Ketidakteraturan rekonsiliasi dan lemahnya dokumentasi berdampak langsung pada akurasi laporan keuangan. Keterlambatan pelaporan seperti yang disebutkan Ibu Yanti dan Bapak Rizal menyebabkan perbedaan signifikan antara saldo kas aktual dan saldo kas menurut pencatatan. Kasus mismatch sebesar Rp 500.000 yang ditemukan dalam penelitian ini memperkuat indikasi adanya material misstatement.

Dampak ini diperkuat oleh teori accounting information quality, yang menyebut bahwa laporan keuangan yang tidak akurat menyebabkan distorsi dalam pengambilan keputusan, baik di level manajerial maupun eksternal (Apriani et al., 2023). Laporan yang tidak mencerminkan kondisi aktual berpotensi menyesatkan investor, auditor, dan regulator.

Kondisi ini juga menunjukkan lemahnya fungsi kontrol yang idealnya menjaga real-time reconciliation dan validasi transaksi.

Jika terus berlanjut, akurasi informasi keuangan dapat terdegradasi, dan corporate governance perusahaan menjadi rentan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kas kecil di PT Socfindo menggunakan sistem Permintaan Uang Muka (PUM) yang bersifat fleksibel, tetapi belum didukung oleh standar operasional prosedur (SOP) tertulis. Pelaksanaan kegiatan masih bergantung pada kebiasaan informal yang diwariskan dari staf sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan proses pencatatan belum konsisten, dokumentasi bukti transaksi masih lemah, serta komunikasi antardepartemen belum terdokumentasi dengan baik sehingga meningkatkan risiko kesalahan dan ketidaktepatan pencatatan keuangan.

Evaluasi berdasarkan kerangka Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) menunjukkan bahwa seluruh komponen pengendalian internal, mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, hingga pemantauan, belum diterapkan secara optimal. Ketiadaan SOP, lemahnya penilaian risiko, pemisahan tugas yang belum tegas, sistem komunikasi yang masih informal, serta tidak adanya monitoring secara berkala menciptakan kelemahan dalam sistem pengendalian keuangan perusahaan dan berpotensi menurunkan keandalan laporan keuangan.

Selain itu, proses rekonsiliasi kas kecil belum dilaksanakan secara rutin dan terdokumentasi dengan baik. Rekonsiliasi hanya dilakukan menjelang penyusunan laporan bulanan sehingga mengakibatkan penumpukan dokumen dan meningkatkan potensi terjadinya selisih saldo kas. Ketidaksesuaian bukti transaksi serta dokumentasi yang belum terstandarisasi turut memperlemah fungsi verifikasi dan audit internal, sehingga berdampak terhadap kualitas informasi keuangan yang disajikan kepada manajemen dan pemangku kepentingan.

Ketidakteraturan dalam pengelolaan kas kecil juga berdampak langsung terhadap akurasi laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketidaksesuaian antara saldo kas fisik dan catatan manual serta keterlambatan pelaporan yang berpotensi menimbulkan salah saji material (material misstatement). Kondisi tersebut dapat menyebabkan distorsi informasi keuangan dan meningkatkan potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik modal sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan (agency theory).

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa upaya perbaikan untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan akurasi laporan keuangan, yaitu penyusunan SOP pengelolaan kas kecil berbasis sistem imprest, digitalisasi proses pencatatan kas kecil secara real-time, penerapan pemisahan tugas yang jelas antarpetugas, pelaksanaan pelatihan rutin terkait pengendalian internal dan akuntansi dasar, serta penerapan pengawasan berkala dan audit mendadak. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan di PT Socfindo.

5. REFERENSI

Aditya Gede, Yenni Samri, N. (2023). Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan Goods Consumer yang Terdaftar di BEI). J-Reb :

Journal- Research of Economic Dan Bussiness Journal, 2(2), 21–31.

Aksara, M., Akademia, G., & Akademia, A. G. (2023). METODOLOGI PENELITIAN (KUANTITATIF & KUALITATIF).

Apriani, A., Nurwani, N., & Juliati, Y. S. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan Dalam Pengungkapan Biaya Lingkungan Berdasarkan Perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2374. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9510

Awalia, M., Siregar, S., & Syarvina, W. (2023). Analisis Implementasi Isak 35 terhadap Laporan Keuangan Masjid Al-Ikhlas Desa Kota Datar. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 1583–1591.

Firdiana, R. F., Marina, A., & Sa'diyah, H. (2023). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Petty Cash Pada Pt. Sinergi Integra Persada. Sustainable, 3(2), 202–215. https://doi.org/10.30651/stb.v3i2.20221

Hardani, N. A. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.

Irayana, M., & Vonna, S. M. (2024). ANALISIS PELAKSANAAN PENCATATAN KAS KECIL (PETTY CASH) PADA PT BARAJAYA (Perseroda). Jurnal Ekobismen, 4(1), 1–14. https://doi.org/10.47647/jeko.v4i1.1803

Iswahyudi. (2022). Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Selama Pandemi Covid 19. Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa, 7(1), 43–57.

Laylan Syafina, Ulfatul Makwa, N. L. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA ANGGOTA PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI), 2(1), 58–65.

Lubis, S. N., Nurbaiti, & Aisyah, S. (2023). Pengaruh perkembangan fintech terhadap kemandirian finansial usaha mikro dengan literasi keuangan dan inklusi keuangan sebagai variabel intervening. Jurnal Bina Bangsa Ekonomika, 16(2), 602–618.

Munawwaroh, Z. (2017). Analisis Manajemen Risiko Pada Pelaksanaan Program. Jurnal Administrasi Pendidikan, 24(2), 71–79. Retrieved from https://web.archive.org/web/20180416074831id_/http://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/viewFile/8295/pdf

Nabila, V. S., & Syarvina, W. (2022). Analisis Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Jurnal Kewarganegaraan, 6(2), 2788–2797.

Ningsih, N. W., Nurlaili, N., & Zuliansyah, A. (2022). Akuntansi Lingkungan dan Kinerja Keuangan Perusahaan dalam Ekonomi Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3349. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5466

Nur'aidah, A., Puspita, N. A., Sari, N. Z. N., & Santoso, R. A. (2024). Analisis Penyusunan Anggaran Biaya Operasional Cv. Sukses Bersama. AKRUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 5(2), 131–138. https://doi.org/10.34005/akrual.v5i2.3625

Nurlaila, Nurbaiti, & Nasution, M. L. I. (2022). The Impact Of COVID-19 Pandemic On The Income Of Traditional Market Traders In Indonesia. Journal of Positive School Psychology, 6(9), 2141–2150.

Pasaribu, S. N., Nasution, Y. S. J., & Harmain, H. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatan Kinerja Pemerintah Desa Sibito. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 7(3), 95–111. https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3307

Qudah, H., Malahim, S., Airout, R., Alomari, M., Hamour, A. A., & Alqudah, M. (2023). Islamic Finance in the Era of Financial Technology: A Bibliometric Review of Future Trends. International Journal of Financial Studies, 11(2), 223–352. https://doi.org/10.3390/ijfs11020076

Rahayu, R., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2024). Analisis Penerapan Pengendalian Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengelolaan Dana Kas Kecil Pada PT Secm Tech Indonesia. Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis, xx(xx), 1–9. Retrieved from http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemicaWebsite:https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica

Rosianie, A. F., Asmarini, J., & Amalia, M. (2024). Analisis Pengelolaan Dana Kas Kecil (Petty Cash) Pada Pt. Aic. Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan, 5(1), 89–94. https://doi.org/10.56486/remittance.vol5no1.659

Sari, N. N., Hasyim, S. H., & Idris, H. (2024). Analisis Prosedur Pencatatan Dan Pengendalian Internal Dana Kas Kecil Pada PT. PLN (Persero). Pinisi Journal Of Art, Humanity & Social Studies, 4(1), 1–5.

Senastri Khaula. (2023). Teori Akuntansi Dan Perkembangannya. In Accurate.D. Retrieved from https://accurate.id/akuntansi/pembahasan-lengkap-teori-akuntansi/

Siti Fatimah Az-Zahra, Nurbaiti, L. S. (2023). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. JRKA, 9(1), 146–167.

Sofiah, M., & Syarvina, W. (2022). Analysis Of Economy Ratio And Growth Ratio In Report Of Budget Realization Of The Regional Development Planning Agency (Bappeda) In Building Medan City Due To Covid-19. Journal of Indonesian Management, 2(2), 213–224. https://doi.org/10.53697/jim.v2i2.603

Yazdipour, R., & Song, M. (1986). Agency Costs and the Theory of the Firm. Financial Review, 21(3), 95–95. https://doi.org/10.1111/j.1540-6288.1986.tb00759.x